

MEMBANGUN PEMERINTAH YANG EKOLOGIS DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD DARI GOOD GOVERNANCE

Dayvina Anjelika¹, Miranda Nur Salsabila², Syarifah Rahmadani³, Friska Alwanda⁴,
Mohamad Rezi⁵

Email: dayvinaanjelika40@gmail.com¹, mirandanursalsabila34@gmail.com²,
syarifahd@gmail.com³, alwndfrska@gmail.com⁴, mohdrezi12@gmail.com⁵

Abstrak: Ekologi administratif dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengendalikan gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan antara negara dan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan penerapan tata kelola yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang ekologis dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai macam material seperti dokumen, buku, jurnal, baik secara offline maupun secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan yang ekologis dan berkelanjutan menjadi landasan esensial dalam menjaga lingkungan hidup serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ekologi Pemerintahan, Kebijakan, Good Governance

Abstract: Government ecology can be used to describe, explain, verify symptoms and events related to the reciprocal relationship between government and the surrounding environment. The aim of this research is to discuss the realization of Good Governance to build an ecological and sustainable government. The method used in this research is library research. Data is collected from various materials such as documents, books, journals, both offline and online. The results of this research show that ecological and sustainable government is an essential basis for protecting the environment and ensuring long-term prosperity for society.

Keyword: Governance Ecology, Policy, Good Governance

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memutuskan kebijakan. Perhatian utama dari governance adalah kebijakan publik, yaitu apa yang dilakukan pemerintah terhadap sesuatu, atau tidak melakukan apa pun (berdiam diri) (apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah) (Syafie, 2020).

Hal yang berkaitan pada pemerintah dalam mengatasi suatu keadaan seperti pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat yang saat ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika pemerintah mengabaikan wabah penyakit, kejahatan seperti pemerkosaan, penculikan, dan perampokan meningkat, dan pedagang mengumpulkan barang sehingga harga naik. Pemerintah juga dapat menangani perselisihan dan mencapai kesepakatan, dan pemerintah dapat bertindak sebagai mediator atau wali. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dan dihasilkan oleh keadaan.

Dalam suatu kebijakan dari pemerintah daerah. berkaitan erat pada proses, juga pada pengambilan keputusan, dan juga kualitas keputusan berpengaruh pada pembaruan kebijakan yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Kualitas kebijakan yang buruk dapat menyebabkan hasil kebijakan yang tidak efektif dan pencapaian tujuan implementasi pemerintah yang kurang optimal di bidang ini. Oleh

karena itu, kualitas kebijakan tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek subsistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan yang diproses melalui dinamika karakteristik diambil dari salah satu keputusan. salah satu yang berkaitan dengan aktor-aktor pengambil kebijakan seperti aktor yang memiliki kebijakan atau kepentingan yang berbeda namun saling berkaitan. hal ini berkaitan pada kebijakan pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pemerintah daerah contohnya. Dapat tercapainya suatu keseimbangan antara sistem pemerintah dengan sebuah keseimbangan perlu adanya pemahaman mengenai ekosistem yang bekerja secara sistematis.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Survei perpustakaan merupakan survei yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan jenis bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti: jurnal, berita, dokumen, buku, majalah, cerita sejarah, peraturan perundang-undangan, dll. Selanjutnya studi kepustakaan juga dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya guna memperoleh landasan teori dari permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, segala upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi ini tersedia dalam buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis, peraturan, peraturan, ensiklopedia, dan sumber tertulis di elektronik lainnya.

Studi Kepustakaan menjadi salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. studi perpustakaan pada Teori diteliti berdasarkan permasalahan yang mendasari di bidang studi perpustakaan, dimana ditemukan teorinya. pada penelitian ini dapat memperoleh seperti informasi mengenai penelitian yang sejenis atau berkaitan dengan penelitiannya, dan juga penelitian yang pernah kembali diteliti. Dengan adanya riset penelitian kepustakaan, peneliti juga memanfaatkan semua jenis informasi dan juga ide sebagai relevan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekologi Pemerintahan

Ekologi administratif adalah kerangka kerja yang mempertimbangkan hubungan kompleks antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini mencakup pemahaman tentang struktur, interaksi dan dinamika sistem pemerintahan dan antara pemerintah dan aktor eksternal. Teori ini didasarkan pada analogi ekologi alam, yang melihat interaksi organisme dengan lingkungannya. Dalam konteks pemerintahan, teori ini menekankan bagaimana struktur, fungsi dan perilaku pemerintahan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal, dan bagaimana pemerintah juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Beberapa elemen penting dalam teori pengelolaan ekologi adalah koneksi dan ketergantungan, yang menekankan bahwa pengelolaan tidak berdiri sendiri tetapi terkait dan bergantung pada faktor eksternal seperti masyarakat, lembaga lain, dan faktor lingkungan. Di sisi lain, faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan pemerintah. Selain sistem terbuka, pemerintahan dianggap sebagai sistem

terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai institusi, masyarakat, kelompok kepentingan dan faktor eksternal lainnya.

Kemampuan beradaptasi dan pembangunan, seperti halnya ekologi alam, pemerintah juga dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Teori ini mengakui bahwa sistem manajemen dapat berubah seiring berjalannya waktu dan beradaptasi dengan kebutuhan baru yang muncul. Pertukaran sumber daya, konsep pertukaran sumber daya antara sistem pemerintahan dan berbagai elemen masyarakat. Sumber daya seperti informasi, kekuasaan dan dukungan dapat mengalir antar aktor yang berbeda dalam sistem. Saling ketergantungan dan dampak dari tindakan pemerintah dapat mempunyai dampak yang jauh lebih luas dari perkiraan sebelumnya, terutama dalam konteks saling ketergantungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Memahami teori ekologi pemerintahan membantu para pemangku kepentingan merancang kebijakan yang lebih komprehensif, mempertimbangkan hubungan kompleks antara pemerintah dan lingkungan, dan memahami dampak dari kebijakan yang diterapkan. Alexander Von Humboldt memandang pemerintahan sebagai organisme hidup yang memiliki siklus hidup. Berdasarkan asumsi tersebut, ekologi pemerintahan mempelajari interaksi antara pemerintahan dengan lingkungannya. Ekologi pemerintahan dapat membantu kita untuk memahami bagaimana pemerintahan dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. (Hasibuan, 2019).

Ekologi pemerintahan memadukan penelitian ekologi dan ilmu pemerintahan, sehingga menghasilkan konsep, hukum, dan teori yang berbeda-beda dari masing-masing ilmu yang dipinjam atau digunakan untuk menjelaskan gejala dan peristiwa ekologi di sektor pemerintahan Ada (Kurniawan, 2021):

- a. Kajian ekologi pemerintahan keterkaitan antara pemerintah sebagai organisme hidup dan lingkungan sekitarnya internal dan eksternal. Lingkungan internal suatu sistem pemerintahan meliputi subsistem pemerintahan dan subsistem yang pelaksanaannya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berjalannya pemerintahan sebagai suatu sistem.
- b. Ekologi pemerintahan dipelajari untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi antara pemerintah dan lingkungannya, proses interaksi, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.
- c. Ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari pemerintahan sebagai suatu sistem dan keterkaitannya dengan lingkungan internal dan eksternalnya.

Good Governance

Banyak aspek pelaksanaan pengelolaan daerah yang harus menjadi pedoman utama agar konsep pelaksanaan pengelolaan mandiri dapat berjalan dengan baik. Aspek-aspek berbeda tersebut antara lain penerapan tata kelola daerah yang baik menjadi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan.

Good governance atau tata kelola yang baik mengacu pada praktik-praktik, proses, dan kebijakan pemerintahan yang berkualitas tinggi dan transparan. Ini melibatkan cara-cara pemerintahan yang mengutamakan keadilan, akuntabilitas, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keseluruhan, good governance bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik melalui prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain: 8 Pertama, sebagai lembaga negara atau sebagai perseorangan. Orang yang bekerja untuk dan untuk orang lain. Kinerja badan eksekutif sebagai lembaga negara merupakan hasil dari negara. Kedua, sebagai lembaga nasional yang mempunyai yurisdiksi independen yang didelegasikan oleh negara. Badan independen ini memungkinkan berfungsinya administrasi publik secara independen serta dalam pengaturan dan pengendalian administrasi publik (Kurniawan, 2021).

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses operasional pemerintahan daerah merupakan syarat agar pemerintahan daerah bersifat demokratis, bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Tata pemerintahan yang baik mengandung arti menjunjung tinggi nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan dikaitkan kepemimpinan. Good governance juga merupakan wujud nyata dari clean state governance atau praktik pemerintahan yang baik dan benar.

Pengaplikasian Judul Artikel

Keberlanjutan mengacu pada proses pembangunan yang dapat memaksimalkan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan juga berarti pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya pembangunan ekonomi selalu menggunakan sumber daya alam dan memungkinkan generasi mendatang untuk melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Landasan hukum pembangunan berkelanjutan adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Pembangunan berkelanjutan seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan. Selain konsep tersebut, konsep lain seperti pembangunan untuk meningkatkan sumber daya alam terbarukan, untuk menjaga atau melestarikan kualitas hidup manusia saat ini dan di masa depan juga diusung. Konsep selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya agar tidak menyia-nyiakkan dan merusak lingkungan. Konsep terakhir mengelola sumber daya alam dengan baik dan dapat dimanfaatkan di masa depan. Seiring berjalannya waktu, pembangunan berubah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) mencerminkan seluruh perubahan yang terjadi sejak akhir periode pembangunan milenium dan mencakup beberapa tujuan baru. Berbeda dengan MDGs yang hanya menasar negara berkembang, TPB mempunyai tujuan yang lebih universal. Penyusunan TPB didasarkan pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan kelembagaan yang dituangkan dalam 17 sasaran/sasaran dan 169 sasaran yang dijabarkan ke dalam berbagai indikator untuk mengukur kinerja (Setianingtias, Baiquni, & Kurniawan, 2019). Penerapan pengelolaan mempunyai dampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Shaliza dan Sujatini menyatakan keberlanjutan dapat dipahami melalui institusi yang ada. Institusi didefinisikan sebagai (Kurniawan, 2021):

- a. Sistem yang bekerja dalam kaitannya dengan lingkungan;
- b. Atur dan kelola item di tempat yang seharusnya kelangsungan struktur dan prosedur organisasi tugas, produk, orang, sumber daya, dan konteks bahwa mereka bertemu dan;
- c. Perhatikan lingkungan dan perubahannya sumber daya.

Pembangunan berkelanjutan oleh karena itu dimaknai sebagai pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri sesuai dengan kekuatan dan kelembagaan yang ada. Secara ekologis mengacu pada upaya penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, membersihkan lingkungan, dan memberikan keadilan bagi generasi mendatang.

Terdapat tiga pilar yang menunjang dalam pembangunan berkelanjutan yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Kurniawan, 2021).

1. Pilar Ekonomi yang Berkelanjutan

Ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam, lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memperhitungkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor.

2. Pilar Sosial yang Berkelanjutan

Ini menekankan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Aspek-aspek seperti pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat adalah bagian dari pilar sosial yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

3. Pilar Lingkungan yang Berkelanjutan

Fokus pada perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Ini mencakup pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan, serta upaya mengurangi polusi dan limbah. Pilar lingkungan yang berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Demokratisasi pelaksanaan tugas negara melalui keterlibatan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah salah satu partai politik (khususnya pemerintah) mendominasi partai politik lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Praktik pemerintahan yang tidak mengikuti prinsip tata kelola yang baik telah mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan, antara lain penggundulan hutan, banjir, dan maraknya pembalakan liar. Di satu sisi, praktik konvensional telah menutup pintu bagi transparansi pemerintah dan proses perencanaan, dan di sisi lain, kontrol terhadap implementasi kebijakan pemerintah tetap berpegang pada prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Mengacu pada penguasaan pemerintah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dan dirancang untuk diciptakan dengan visi melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi pendukung lingkungan hidup dalam praktik pembangunan berkelanjutan.

Ada hubungan erat antara tata kelola yang baik dan pengelolaan lingkungan yang baik. Tata kelola yang baik mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yang mencerminkan tingkat tata kelola yang baik. Tanpa tata kelola yang baik, kecil harapan bagi pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup juga berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ada 13, antara lain pertimbangan lingkungan hidup, kepastian

hukum, keseimbangan, tidak adanya pencampuran kekuasaan, prinsip keadilan dan pemerataan, terpenuhinya harapan, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kepentingan umum. Keterkaitan praktik good governance dengan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup akan dijelaskan dengan menggunakan contoh kerusakan lingkungan hidup yang terjadi pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh tidak adanya good governance.

Membangun tata kelola yang baik merupakan prasyarat bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memenuhi syarat-syarat akan membantu dalam membangun dasar yang kokoh bagi tata kelola yang baik, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan seluruh ekosistem sosial. Pemerintah yang dapat mencapai tata kelola yang baik tidak perlu khawatir terhadap aspek kelestarian ekologi. Ketidaktahuan ini akan berdampak besar terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan tambahan bagi pemerintah yang berkomitmen terhadap tata pemerintahan yang baik. Upaya mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Membangun pemerintahan yang ekologis dan berkelanjutan adalah salah satu aspek penting dari good governance yang menempatkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Membangun pemerintahan yang ekologis dan berkelanjutan adalah salah satu aspek penting dari good governance yang menempatkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan memberikan lingkungan yang baik, dan sebaliknya jika tata pemerintahannya buruk akan memberikan lingkungan yang buruk pula.

Pemerintahan yang ekologis dan berkelanjutan menjadi landasan esensial dalam menjaga lingkungan hidup serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Good governance merupakan fondasi bagi implementasi pemerintahan yang berfokus pada keberlanjutan ini, di mana keputusan yang bijak, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan menjadi pilar utamanya. Dalam membentuk pemerintahan yang ekologis, prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk menyelaraskan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 33+47.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Ekologi Pemerintahan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). PKBM Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDG'S. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 303-309.

- Setianingtias, R., Baiquni, & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1-14.
- SMI, P. (2022, Juni 20). Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep, dan Tujuan. Retrieved from PT. Sarana Multi Infrastruktur:
<https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>
- Syafiie, I. K. (2020). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.